

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3/HK/K.JB/04/2026**

TENTANG

**DEWAN REDAKSI DAN TIM PENGELOLA JURNAL KEADILAN
PEMILU BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka pengelolaan Jurnal Keadilan Pemilu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu secara kelembagaan untuk terwujudnya publikasi kinerja pengawasan Bawaslu di Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Dewan Redaksi dan Tim Pengelola Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam suatu Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;

- 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
- 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67)
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Dewan Redaksi dan Tim Pengelola Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA : Dewan Redaksi dan Tim Pengelola Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdiri dari dan memiliki tugas sebagai berikut
 - 1. Pelindung
 - a. Memberikan dukungan kelembagaan dan legitimasi terhadap jurnal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- b. Menjaga agar jurnal tetap berada dalam koridor visi dan misi kelembagaan Bawaslu.
- 2. Penasehat
 - a. Memberikan masukan strategis dan akademik untuk pengembangan jurnal;
 - b. Menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan penting terkait arah dan kebijakan jurnal.
- 3. Pengarah
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan jurnal;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan editorial agar sesuai dengan standar ilmiah dan etika publikasi.
- 4. Editor in Chief
 - a. Bertanggung jawab penuh atas isi, kualitas, dan integritas jurnal;
 - b. Memimpin proses editorial, mulai dari seleksi naskah, penugasan reviewer, hingga publikasi.
- 5. Managing Editor
 - a. Mengelola operasional harian jurnal, termasuk komunikasi dengan penulis dan reviewer;
 - b. Menyusun jadwal penerbitan dan memastikan kelancaran proses editorial.
- 6. Editor Boards
 - a. akademisi atau praktisi yang membantu menilai kualitas dan relevansi naskah;
 - b. Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan publikasi dan menjaga standar akademik.
- 7. Copy Editor
 - a. Menyunting naskah dari segi tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan;
 - b. Menyesuaikan naskah dengan pedoman penulisan jurnal agar konsisten dan profesional.
- 8. Proofreader
 - a. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap naskah sebelum diterbitkan.
 - b. Menjamin kualitas presentasi naskah secara keseluruhan agar terlihat profesional dan rapi;
 - c. Berkoordinasi dengan copy editor dan layout editor untuk memastikan bahwa versi final naskah sudah siap cetak atau unggah..
- 9. Layout Editor
 - a. Menata tampilan visual artikel agar sesuai dengan format jurnal;

- b. Mengatur elemen seperti tabel, gambar, margin, dan tipografi agar mudah dibaca.

10. Cover Designer

- a. Mendesain sampul jurnal yang menarik dan mencerminkan tema edisi;
- b. Menyesuaikan desain dengan identitas visual Bawaslu dan estetika akademik.

11. Reviewer

- a. Menilai kualitas ilmiah, orisinalitas, dan relevansi naskah terhadap tema jurnal;
- b. Memberikan masukan konstruktif kepada penulis untuk perbaikan naskah;
- c. Menjaga objektivitas dan integritas proses peer-review.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Susunan Dewan Redaksi dan Tim Pengelola Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3/HK/K.JB/04/2026
TANGGAL: 1 Maret 2026

SUSUNAN DEWAN REDAKSI DAN TIM PENGELOLA JURNAL
KEADILAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pelindung
2.	Usep Agus Zawari,S.Sos.I	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Penasehat
3.	Muamarullah, S.Sos.I	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Penasehat
4.	Fereddy,S.E.,M.H.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Penasehat
5.	Syaiful Bachri,S.Pd.,M.M.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Penasehat
6.	Drs.Harminus Koto,M.I.Kom	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Penasehat
7.	Hj. Nuryamah,S.E.I.,M.H.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Penasehat
8.	Widodo Wuryanto,S.IP.,M.Si.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pengarah
9.	Andhika Pratama,S.IP.,M.IP	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Editor in Chief
10.	Billy Adam Fisher, S.H.,M.H	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Managing Editor
11.	Muhammad Husni Abdullah Pakarti, S.H.,M.H.	Universitas Muhammadiyah Bandung	Editor Boards
12.	Cepi Luki Cepriana, S.T.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Copy Editor
13.	Indira Saraswati,S.H.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Copy Editor
14.	Latifatul Qolbi,S.H., M.H.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Proofreader
15.	Tanti Meishanti Yuliandari, S.Kom.,M.T.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Proofreader
16.	Ade Rahman, S.E.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Proofreader
17.	Sabar Triono	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Layout Editor
18.	Dulkodir	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Layout Editor
19.	Huda Dindin Pratama,S.H.,M.H.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Layout Editor
20.	Irfan Paturohman,S.Pd.,M.Ipol	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Cover Designer
21.	Jihad Khufaya,S.Pd.,M.H.	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Cover Designer
22.	Dr.Yuyut Prayuti,S.H.,M.H.	Universitas Islam Nusantara	Reviewer
23.	Neni Nur Hayati, M.I.Kom.	Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP Indonesia)	Reviewer
24.	Dr. Diana Farid,S.Ag.,S.H.,M.ES	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut	Reviewer

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

25.	Dr.Haris Maiza Putra,S.H.I.,M.H.	STAI Al-alah Cicalengka Bandung	Reviewer
26.	Dr. Mifftahul Huda,S.Pd.I.,M.Ag	Universitas Muhammadiyah Bandung	Reviewer
27.	Dr.Indra Budi Jaya,S.H.,M.H.	Universitas Muhammadiyah Bandung	Reviewer

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM